

**DETERMINAN FAKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK  
REGIONAL BRUTO DI JAWA TENGAH**



**Oleh:**

**Nama : Muhammad Hanif Nurshifa**

**NIM : 14313218**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2018**

**DETERMINAN FAKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL**

**BRUTO DI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I

Program Studi Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Hanif Nurshifa

Nomor Mahasiswa : 14313218

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Penulis



Muhammad Hanif Nurshifa

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Determinan Faktor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Jawa Tengah**

**Nama : Muhammad Hanif Nurshifa**

**Nomor Mahasiswa : 14313218**

**Program Studi : Ilmu Ekonomi**

**Yogyakarta, 10 Agustus 2018**

**Telah disetujui dan disahkan oleh**

**Dosen Pembimbing,**



**Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc.**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN FAKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI  
JAWA TENGAH**


Disusun Oleh : **MUHAMMAD HANIF NUR SYIFA**

Nomor Mahasiswa : **14313218**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 19 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

  
.....

Penguji : Prastowo, SE., M.Ec..Dev.

  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



  
Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **MOTTO**

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada sebuah kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Amalan yang lebih dicintai Allah SWT adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit.

(Nabi Muhammad S.A.W)

Golek sampurnaning urip lahir batin lan golek kusumpurnaning pati

(Muhammad Hanif Nurshifa)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala rahmatnya dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Orang tua penulis, Isriyadi dan Ponirah
3. Keluarga inti maupun keluarga besar penulis
4. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
5. Semua teman dan sahabat penulis yang memberi dukungan kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puja dan puji syukur atas segala karunia, nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat dan salam tidak lupa dicurahkan kepada nabi besar Muhammad S.A.W serta para sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini diselesaikan guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana strata 1 untuk jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi dengan judul **Determinan Faktor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Jawa Tengah**

Dalam membuat dan menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh penulis sehingga jauh dari kata sempurna, dari segi isi maupun tampilan tata letak. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan penulis khususnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan, dukungan, semangat serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, petunjuk dan kemudahan yang tiada henti kepada seluruh umatNya dan termasuk penulis.



2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan segala perjuangannya, sehingga kita semua mendapat rahmat dan hidayah yang telah diberikan.
3. Orang tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Bpk Isriyadi dan Ibu Ponirah atas segala yang telah mereka berdua berikan hingga saat ini penulis dapat tumbuh dan belajar hingga menyelesaikan skripsi ini. Selain itu adik Hanifa Rizkiani Fauziah yang menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini . serta keluarga dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Kakak-kakak sepupu Rifqy, Nikma, dan Nia yang selalu menghibur saya dikala saya kesusahan dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan motifasi dan waktunya untuk penulis.
6. Teman-teman kontrakan Derian, Billy, Irfan, Diar, Dana, Alfin, dan Rizal yang selalu berbagi kebahagiaan dan kesusahan bersama dalam mengerjakan skripsi ini dengan besama-sama.
7. Teman-teman dekat saya Indah, Fajar, Toro, Beny, Andreas, dan Erni yang selalu perhatian dengan saya dikala penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi saya.
8. Untuk Elsa Fahrotun Nisa yang telah senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama teman bridging program kelas E angkatan 2014 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini semoga bisa bermanfaat bagi semua.

pihak tanpa terkecuali dan terutama bagi civitas Universitas Islam Indonesia,  
Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN UJIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	14
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	16
2.1 Kajian Pustaka.....	16
2.2 Landasan Teori.....	25
2.3 Krangka Pemikiran .....	31
2.4 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Produk domestik regional bruto .....	31
2.5 Hipotesis.....	34

BAB III .....	35
METODE PENELITIAN .....	35
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	35
3.2 Definisi Variabel .....	35
3.3 Metode Analisis Data .....	38
3.4 Model Estimasi Data Panel .....	41
BAB IV .....	44
HASIL ANALISIS DAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	44
4.2 Hasil dan Analisis Data .....	45
4.3 Estimasi Model Regresi Panel Fixed Effect .....	51
4.4 Uji F ( Pengujian Variabel Secara Menyeluruh ) .....	54
4.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.6 Interpretasi Hasil .....	55
4.7 Analisis/pembahasan .....	56
4.8 Perbedaan Model Variabel .....	60
BAB V .....	62
SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Implikasi .....	63
Daftar Pustaka .....	64
LAMPIRAN .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Analisis Deskriptif .....	46
Tabel 4 2 Hasil Estimasi Common Effect Model .....	48
Tabel 4 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model .....	48
Tabel 4 4 Hasil Estimasi Random Effect Model.....	49
Tabel 4 5 Hasil Chow dengan Redudent Test.....	50
Tabel 4 6 Hasil Uji Hausman .....	51
Tabel 4 7 Estimasi Model Regresi Panel Fixed Effect .....	51
Tabel 4 8 Perbedaan Model Antar Kabupaten/kota .....	60

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 1 PDRB Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur (2010-2016) .....	5
Grafik 1 2 PAD Jawa Tengah (2010-2016) .....	7
Grafik 1 3 IPM Jawa Tengah (2010-2016) .....	8
Grafik 1 4 Jumlah Penduduk Jawa Tengah (2010-2016).....	10
Grafik 1 5 Belanja Pemerintah Jawa Tengah (2010-2016).....	12

## **ABSTRAK**

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara, yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung yang kadang-kadang bersifat dramatis pada tiap-tiap daerah. produk domestik regional bruto merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil dari produk domestik regional bruto akan dapat dinikmati masyarakat baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Penelitian ini untuk menganalisis produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2016. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data times series tahun 2010 – 2016 dan data cross section 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, IPM, PAD, dan belanja pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk signifikan dan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto, variabel IPM signifikan dan berpengaruh negatif, PAD berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif dan variabel belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, IPM, PAD, dan Belanja Pemerintah





## **ABSTRACT**

Gross regional domestic product is one indicator of a country's development, which has a direct or indirect influence that is sometimes dramatic in each region. Gross regional domestic product is the main measure of successful development, and the results of gross regional domestic products will be enjoyed by the community either by itself or by government intervention. This study is to analyze the gross regional domestic product of the Regency / City of Central Java Province in 2010-2016. This study uses a panel data that connects the times series data in 2010-2016 and cross section data of 35 Regencies / Cities in Central Java Province. The data used in this study are secondary data which includes gross regional domestic product, population, HDI, PAD, and government spending. The results of this study indicate that the variable population is significant and positively correlated with gross regional domestic product, the HDI variable is significant and has a negative effect, PAD has a significant and positive effect and the government expenditure variable has no influence.

**Keywords:** Gross Regional Domestic Product, Total Population, HDI, PAD, and Government Expenditure

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta (Sukirno, 2006:57-59).

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu daerah adalah meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut. Wilayah administratif suatu Pemerintahan dengan Tingkat I, Tingkat II dan Desa merupakan wilayah domestik Provinsi, kabupaten/Kota dan desa.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurang

dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/negeri tersebut (Hakim, 2002:10-15)

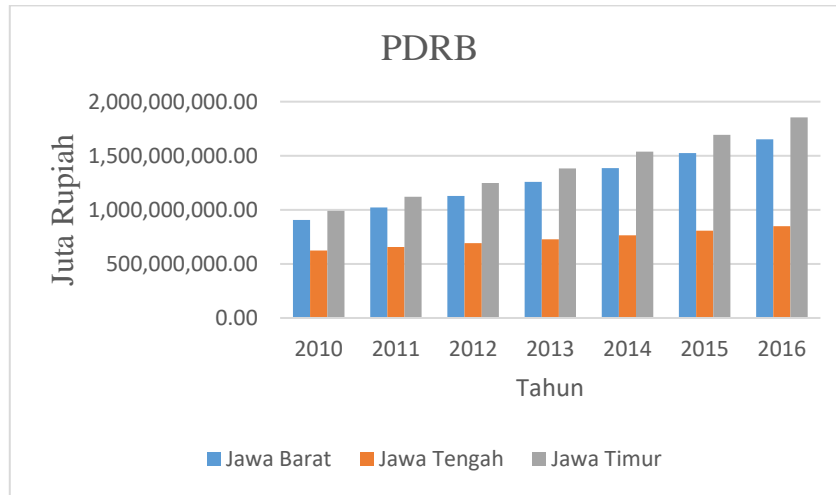
Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat, (Rahman,2014).

Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi PDRB yaitu Tabungan, Kredit, PAD dan Belanja Daerah, Izzah (2015) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi PDRB yaitu IPM dan Inflasi dan Aryanto (2015) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi PDRB yaitu Jumlah penduduk dan Pengangguran. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu IPM, jumlah penduduk, PAD, belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut

mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 82).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa Tengah yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan selain itu Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota yang banyak berjumlah 35 kabupaten/kota. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu lama tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan (Zaris, 1987: 86).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

*Grafik 1.1 PDRB Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur (2010-2016)*

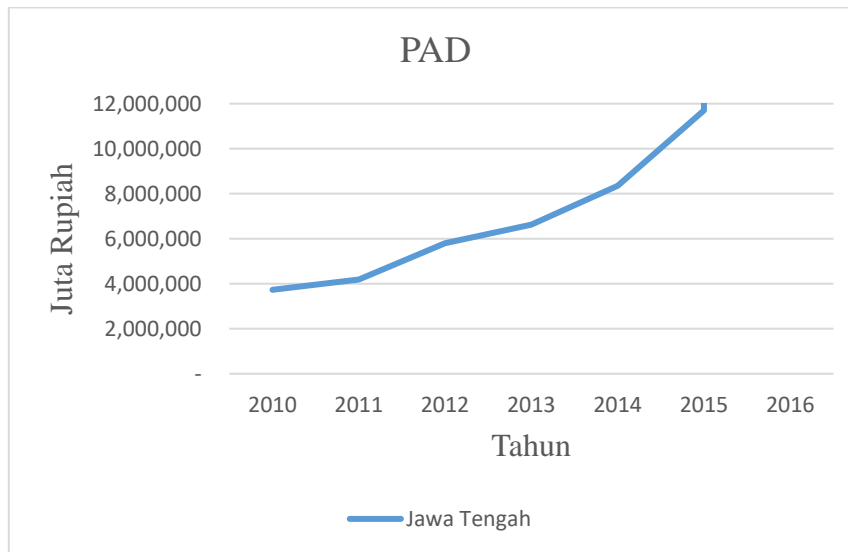
Grafik 1.1 menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. PDRB menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan atau tidak, ketika PDRB mengalami peningkatan berarti pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan.

Dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah. Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai PDRB Jawa Tengah selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur, bahkan lebih rendah dari Jawa Barat. Ini terlihat dalam Tabel 1.2, PDRB Jawa Tengah yang mengalami kenaikan tetapi masih kalah di banding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka tersebut cukup signifikan yaitu hampir 2 kali lipat dari PDRB Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari kekayaan yang dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi pemasukan bagi suatu daerah.

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha, baik milik pemerintah atau swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah diatur dalam undang-undang. Daerah yang produk domestik regional brutonya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan kondisi ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal / daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD akan dapat menurunkan produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah tersebut (Mulyanto, 2007:43-52).



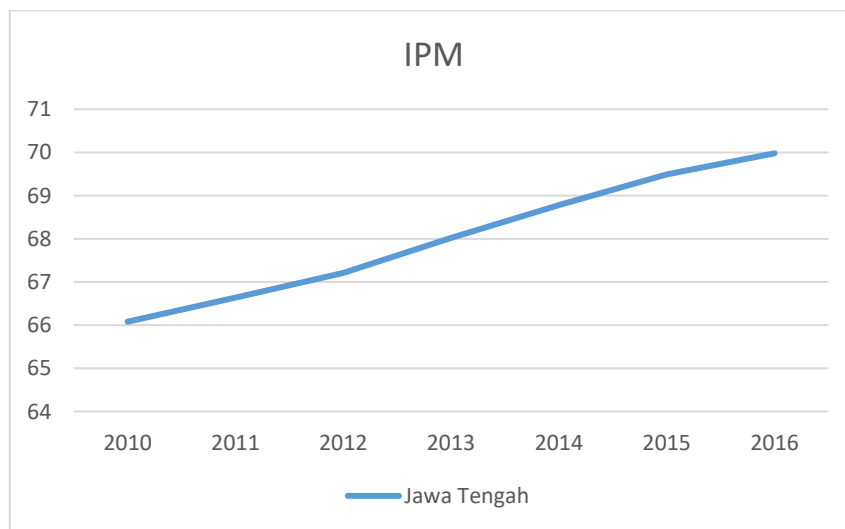
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)  
 Grafik 1 2 PAD Jawa Tengah (2010-2016)

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2010 PAD Jawa Tengah hanya Rp. 3,729,062 (juta) dan mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga pada tahun 2016 telah mencapai nilai Rp. 11,541,030 (juta). Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Selain PAD, IPM juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dimana ketika kualitas manusia yang ada disuatu daerah baik akan mempengaruhi produk domestik regional bruto suatu daerahnya pula. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (performa) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembanguann Manusia (IPM)



atau Human Development Index (HDI). Hubungan pembangunan manusia dengan produk domestik regional bruto sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia. Upaya perbaikan pembangunan manusia akan mendukung peningkatan produktivitas dan usaha-usaha produktif yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan.



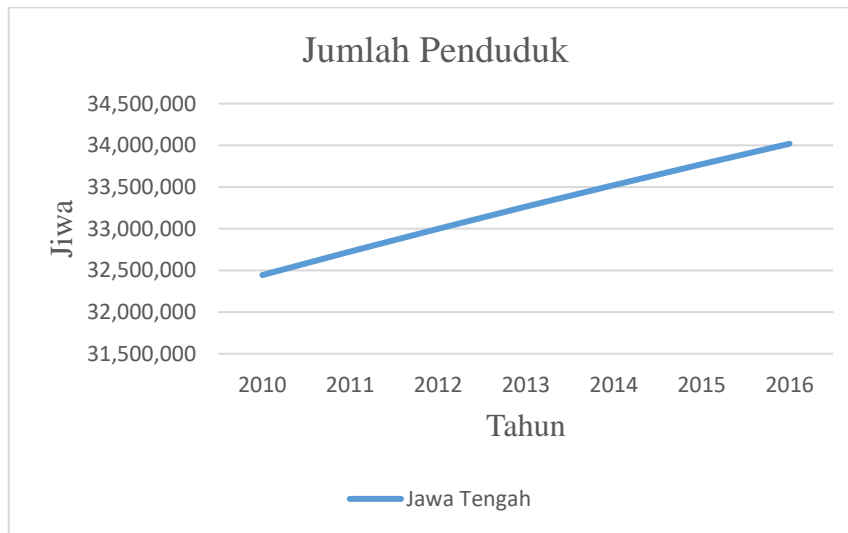
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)  
*Grafik 1 3 IPM Jawa Tengah (2010-2016)*

IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perubahan yakni peningkatan pada setiap tahunnya. Hal menunjukkan bahwa kualitas manusia yang ada di Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan kearah yang lebih baik, perubahan yang lebih baik ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan programnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang kesehatan. Peningkatan indeks pembangunan manusia salah satunya didukung oleh angka harapan hidup yang semakin meningkat pada setiap tahunnya, peningkatan angka harapan hidup disebabkan karena ketersediaan alat – alat kesehatan yang semakin baik, akses

masyarakat dalam menjangkau kesehatan semakin mudah, pola pikir masyarakat pentingnya hidup sehat dan meningkatnya bayi yang baru lahir.

Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong produk domestik regional bruto. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula produk domestik regional bruto. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi produk domestik regional bruto. (Adipuryandti dkk, 2015)

Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap produk domestik regional bruto di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk di satu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Peningkatan pertumbuhan populasi akan berdampak positif terhadap produk domestik regional bruto. Di pihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2000:236).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

*Grafik 1 4 Jumlah Penduduk Jawa Tengah (2010-2016)*

Jumlah penduduk provinsi Jawa Tengah tiap tahun selalu mengalami kenaikan. pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan berkembangnya usia ketergantungan penduduk, oleh karena itu faktor-faktor demografi dapat sebagai faktor penghambat ataupun sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak terbantahkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi demografi penduduk sangat beragam diantara adalah, masalah laju pertumbuhan ekonomi, angka ketergantungan, permasalahan pendidikan berupa rasio penduduk sekolah di sekolah menengah dan laju migrasi merupakan masalah yang sangat krusial untuk diteliti, dimana ke-empat variabel tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jika permasalahan kependudukan tersebut tidak dapat teratasi dengan baik akan menjadi penghambat dalam produksi bruto daerah yang tertuang dalam PDRB harga konstan yang akan melihat perekonomian baik nasional maupun dalam tingkat daerah.

Masalah lain yang berkaitan dengan produk domestik regional bruto adalah belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian, (Anitasari & Soleh, 2012).

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu produk domestik regional bruto. Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian.

- a. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja

bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah dasa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

- b. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah, (Sitaniapessy, 2013).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

*Grafik 1 5 Belanja Pemerintah Jawa Tengah (2010-2016)*

Berdasarkan data rasio belanja Pemerintah Provinsi Jawa tengah tahun 2010-2016 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya rasio belanja pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 mencapai Rp. 5,665,315,683,000 dan tertinggi pada tahun 2016 yang

mencapai Rp. 22,426,201,874,000. Hal ini menunjukkan bahwa rasio belanja pemerintah tiap-tiap tahun di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh variabel IPM terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016?
2. Apakah pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016?
3. Apakah pengaruh variabel PAD terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016?
4. Apakah pengaruh variabel belanja pemerintah terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel IPM terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016.
2. Untuk menganalisis variabel jumlah penduduk terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel PAD terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016.

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah terhadap Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 2010-2016.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk domestik regional bruto.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan Produk domestik regional bruto.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat membantu pembaca untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

##### Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

##### Bab II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Berisikan pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori membahas tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian.

### Bab III. Metode Penelitian

Berisikan jenis dan cara pengumpulan data penelitian yang akan digunakan, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### Bab IV. Hasil dan Analisis

Memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasan lebih lanjut hasil analisis data.

### Bab V. Simpulan dan Implikasi

Berisikan tentang simpulan-simpulan yang disarikan dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian hasil dan memberikan rekomendasi jawaban atas tujuan penelitian serta memberikan solusi atas rumusan masalah.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Rahman (2015), melakukan penelitian tentang PDRB di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2008-2012. Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom yang memiliki daerah yang luas dan juga sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Jawa terus mengupayakan pembangunan dan produk domestik regional bruto untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian yang diperoleh akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan kabupaten / kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut termasuk sumberdaya yang dimilikinya.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya tentang bagaimana memacu pertumbuhan output daerahnya sehingga kesejahteraan penduduknya meningkat. Data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah tertentu. Nilai pertumbuhan PDRB ini akan menunjukkan sejauh mana suatu daerah memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain itu jumlah belanja daerah juga menjadi indikator untuk melihat suatu kondisi ekonomi di suatu daerah dengan melihat seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah yang bersangkutan. Belanja daerah dapat menjadi bentuk sangsang yang dilakukan pemerintah terhadap perekonomian daerah. Jika semakin tinggi jumlah

belanja daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kondisi ekonomi daerah tersebut akan meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengukur kemajuan perekonomian daerah dengan mengamati seberapa besar laju produk domestik regional bruto yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRBKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008- 2012 mengalami pertumbuhan karena banyak yang mempengaruhinya, seperti: Tabungan, Kredit, PAD dan Belanja Daerah.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB. Sedangkan variabel independennya adalah tabungan, kredit, pendapatan (PAD) dan belanja. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS dengan menggunakan data time series pada tahun 2008 -2012 dan crosssection data 35 kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah yang sering disebut sebagai panel data. Model ini diuji dengan menggunakan Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi pada  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa secara parsial, tabungan dan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara itu, variabel PAD dan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012.

Izzah (2015), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Produk domestik regional bruto Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013. Pembangunan diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Manusia atau masyarakat adalah kekayaan

dan modal dasar dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan pada indikator ekonomi maupun sosial kearah yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh IPM dan inflasi terhadap produk domestik regional bruto Riau. Penelitian ini bersifat kuantitatif analitik dengan data primer dengan deret waktu yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif variabel IPM terhadap variabel produk domestik regional bruto. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif variabel inflasi terhadap variabel produk domestik regional bruto.

Arianto (2015), melakukan penelitian tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Produk domestik regional bruto Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan produk domestik regional bruto pemerintah harus bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut dan melakukan hubungan kerjasama dengan bidang swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi didalam wilayah tersebut.

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan produk domestik regional bruto, dengan produk domestik regional bruto yang tinggi tentu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Produk domestik

regional bruto adalah salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Time Series dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu pada uji parsial (uji t) diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Jember.

Sari (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Belanja pemerintah Terhadap Produk domestik regional bruto Di Indonesia. Investasi akan menjadi langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan produk domestik regional bruto. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya produk domestik regional bruto, mencerminkan tinggi dan rendahnya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan.

Pandangan tentang pentingnya investasi dalam menunjang pembangunan negara-negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud

untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat produk domestik regional bruto.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah untuk produk domestik regional bruto di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan variabel investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. Produk domestik regional bruto dapat dijelaskan oleh variabel investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah sebesar 74,1 persen dan sisanya 25,9 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil estimasi variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. Hasil estimasi untuk variabel investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. Hasil estimasi untuk variabel belanja pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia.

Afiyah (2011), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Laju Belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998 – 2008 Menggunakan Program Minitab 14. Untuk menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan yang baru, dibutuhkan strategi yang baru pula. Berbagai ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui Sidang Istimewa yang lalu merupakan strategi kita untuk keluar dari krisis dan kepercayaan serta menghadapi era globalisasi. Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan segera membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian kedua UU tersebut direvisi lagi dengan UU No. 32 dan No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan UU tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laju Belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu 1998 – 2008. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota Malang yaitu sebesar 66.5% sedangkan satu variabel bebas lainnya yaitu laju Belanja pemerintah berpengaruh tidak signifikan hal ini dikarenakan adanya laju Belanja pemerintah berpengaruh tidak secara langsung.

Julfiansah (2013), melakukan penelitian tentang Pengaruh Investasi PMA / PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Kesenjangan pembangunan dan pendapatan antar penduduk bukanlah merupakan masalah pembangunan nasional, tetapi juga oleh Kota Samarinda sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga grand strategy Trilogi Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia juga membawa implikasi kebijakan bagi Kota Samarinda, terlebih kebijakan pembangunan yang cenderung sentralistik sebelum era reformasi maka lingkungan strategis kebijakan nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap strategi pembangunan di Kota Samarinda.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah berbenah diri untuk meningkatkan pendapatannya. Seluruh potensi yang dimiliki daerah Samarinda dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan pendapatan. Berbagai fasilitas juga dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi. Dari sektor-sektor yang ada tersebut, dengan adanya otonomi daerah semakin memudahkan pemerintah daerah untuk mengelolanya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan, terutama di bidang perekonomian agar dapat meningkatkan produk domestik regional bruto secara merata.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda.

Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pada model pertama (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara simultan. (2) secara parsial hanya jumlah penduduk yang berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan hasil penelitian model kedua menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. (2) secara parsial tidak ada variabel baik Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Paksi (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk domestik regional bruto Provinsi Lampung. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, produk domestik regional bruto adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan



untuk melihat laju produk domestik regional bruto adalah persentase perubahan PDRB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto provinsi lampung. Menggunakan pendekatan Regresi Linier Berganda, *Ordinary Least Square* dengan variabel terikat Produk domestik regional bruto dan variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Net Ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dengan Koefisien Regresi  $-0.000685$  memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Lampung. Tenaga kerja dengan koefisien  $3.245693$  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Lampung. Variabel Tingkat pendidikan dengan koefisien  $488.4898$  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Lampung dan Net ekspor dengan koefisien  $0.004485$  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Lampung.

Fitri (2016), melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk domestik regional bruto Di Indonesia Tahun 1984-2013. Produk domestik regional bruto merupakan permasalahan jangka panjang yang selalu dihadapi oleh suatu negara. Produk domestik regional bruto di Indonesia masih tergolong fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konsumsi pemerintah, investasi swasta dan modal instansi terhadap produk

domestik regional bruto di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu produk domestik regional bruto, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan modal insani yang bersumber dari BPS periode tahun 1984-2013. Data diolah menggunakan analisis data time series dengan model regresi *Error Correction Model* (ECM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada jangka panjang konsumsi pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. Sedangkan investasi swasta dan modal insani mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Pada jangka pendek, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan modal insani tidak signifikan dalam mempengaruhi produk domestik regional bruto di Indonesia. ECT dalam jangka pendek signifikan dengan nilai negatif yang menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto**

Produk domestik regional bruto merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Produk domestik regional bruto diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, produk domestik regional bruto suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era

ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan produk domestik regional bruto tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Raharjo, 2008:178).

Menurut Sukirno (2008 : 423), Produk domestik regional bruto berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu daerah. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan. Peningkatan produk domestik regional bruto mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Produk domestik regional bruto menurut Murni (2009 : 169) produk domestik regional bruto adalah suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

### **2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100 (*Human Development Report*, 1995).

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber produk domestik regional bruto, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai produk domestik regional bruto. Adapun menurut Mankiw dalam (Nurmainah, 2013), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar (Aryanto, 2017).

### **2.2.3 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Perubahan jumlah penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (Hutabarat, 2013). Dari jumlah penduduk tersebut yang paling dominan menggerakkan produk domestik regional bruto adalah tenaga kerja.

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dalam proses produksi

disamping sumber daya alam, teknologi dan keahlian kewirausahaan (Hutabarat, 2013).

#### **2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa pada prinsipnya pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapan asli daerah.
- b. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Pinjaman daerah, dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Afiyah, 2014).

Peningkatan PAD akan mendorong produk domestik regional bruto daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu produk domestik regional bruto daerah menjadi lebih baik daripada produk domestik regional bruto daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan produk domestik regional bruto, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Setiyawati, 2007).

### **2.2.5 Belanja Pemerintah**

Menurut (Lontaan 2016) Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja Pemerintah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

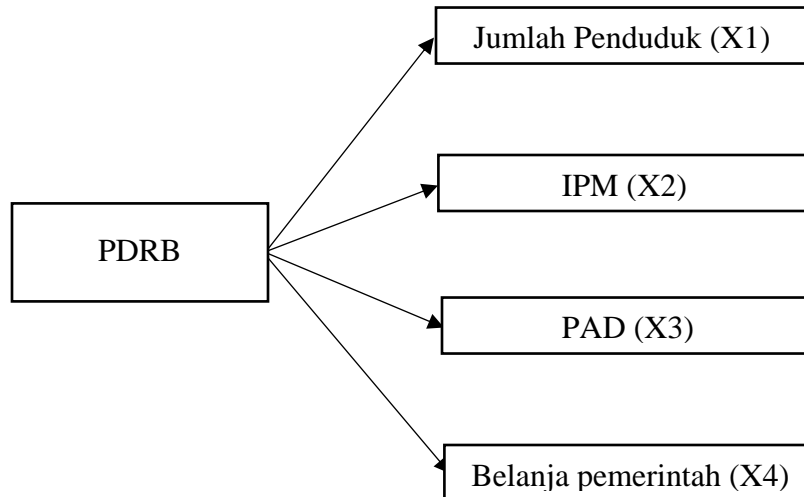
1. **Klasifikasi Ekonomi** Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain–lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.
2. **Klasifikasi menurut Organisasi Publik** Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.
3. **Klasifikasi Fungsi** Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi–fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Deviani (2016) Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional, setidaknya dalam dua tahap. Dalam jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor swasta yang turut berperan dalam perekonomian.

Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

### 2.3 Krangka Pemikiran



### 2.4 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Produk domestik regional bruto

#### 2.4.1 Hubungan jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto

Jumlah penduduk memiliki peran yang penting terhadap produk domestik regional bruto karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat meningkatkan permintaan produk yang dimiliki sehingga banyak peningkatan produksi yang dilakukan sehingga semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan, dengan demikian pengangguran berkurang dan produk domestik regional bruto akan meningkat.

#### 2.4.2 Hubungan indeks pembangunan manusia terhadap produk domestik regional bruto

Indeks pertumbuhan manusia merupakan modal penting untuk produk domestik regional bruto, tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide),



keaktivitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber produk domestik regional bruto, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai produk domestik regional bruto yang meningkat.

#### **2.4.3 Hubungan pendapatan asli daerah terhadap produk domestik regional bruto**

PAD merupakan modal penting dalam produk domestik regional bruto. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu produk domestik regional bruto daerah menjadi lebih baik daripada produk domestik regional bruto daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan produk domestik regional bruto, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.4.4 Hubungan Belanja Pemerintah terhadap produk domestik regional bruto**

Belanja pemerintah tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output. Pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan

serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Secara agregat, peningkatan belanja pemerintah akan ikut menambah pendapatan nasional sehingga akan meningkatkan produk regional domestik bruto.

Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk diduga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.
4. Belanja pemerintah diduga berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang penulis peroleh melalui situs resmi setiap instansi yang bersangkutan yaitu Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Data yang digunakan merupakan data panel dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 hingga 2016. Data variabel Pertumbuhan Ekonomi, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja pemerintah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

#### **3.2 Definisi Variabel**

##### **1. Produk Domestik Regional Bruto (Y)**

Produk domestik regional bruto merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah.

Data produk domestik regional bruto yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan dari tahun 2011-2016 dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan dihitung berdasarkan juta rupiah.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100 (*Human Development Report*, 1995).

Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan dari tahun 2011-2016 dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan persen.

## 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Perubahan jumlah penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (Hutabarat, 2013).

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan dari tahun 2011-

2016 dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan dihitung berdasarkan persentase.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Afiyah, 2011).

Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan dari tahun 2011-2016 dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan dihitung berdasarkan juta rupiah.

#### 5. Belanja pemerintah

Menurut (Lontaan 2016) Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja Pemerintah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010).

Data Belanja pemerintah yang digunakan dalam penelitian adalah total dari belanja pemerintah secara langsung dan belanja pemerintah tidak langsung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan dari tahun 2010-2016 dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan dihitung berdasarkan juta rupiah.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi data panel. Model regresi data panel merupakan perpaduan antara analisis data cross section dan time series. Model ini digunakan untuk menganalisis data-data berdasarkan deret waktu seperti pertumbuhan ekonomi dari beberapa tahun serta beberapa wilayah secara bersama-sama.

Penggabungan dari kedua data ini dapat mengatasi masalah yang timbul karena penghilangan variabel; memberikan data yang lebih informatif; membangun dan menguji model yang lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan data time series atau cross-section murni karena data panel merupakan gabungan dari kedua studi ini; serta dapat meminimumkan bias yang terjadi bila mengelompokkan individu ke dalam kelompok yang lebih besar. Regresi data panel memiliki tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). FEM adalah model regresi data panel yang menggunakan variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan karakteristik, baik antarindividu maupun antarwaktu. Penerapan regresi data panel sebagai salah satu metode untuk mengetahui perbedaan karakteristik dapat juga diterapkan pada kasus tenaga kerja (Ratnasari, 2014).

#### **3.3.1 Uji Common Effect Model (CEM)**

Model common effect diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan nilai intersep dan slope pada hasil regresi baik atas dasar perbedaan antar individu maupun antar waktu. Metode pendugaan parameter pada model common effect menggunakan

metode *Ordinary Least Square* (OLS). Secara umum, persamaan model *common effect* ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^k \beta_k X_{kit} + U_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$ ;  $t = 1, 2, \dots, T$ ;  $k = 1, 2, \dots, K$

Dengan :

$Y_{it}$  = Variabel respon pada unit observasi ke- $i$  dan waktu ke- $t$

$X_{kit}$  = Nilai variabel bebas ke- $k$  untuk cross section ke- $i$  dan tahun ke- $t$

$\beta_k$  = Koefisien slope

$\beta_0$  = Intersep model regresi

$K$  = Banyaknya variabel bebas

$N$  = Banyaknya observasi

$T$  = Banyaknya periode tahun

$U_{it}$  = Galat pada unit observasi ke- $i$  dan waktu ke- $t$

### 3.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode pendugaan regresi data panel pada model *fixed effect* menggunakan teknik penambahan variabel dummy atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Terdapat dua asumsi yang terdapat pada model fixed effect yaitu sebagai berikut :

Slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit individu.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \sum_{k=1}^k \beta_k X_{kit} + U_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$ ;  $t = 1, 2, \dots, T$ ;  $k = 1, 2, \dots, K$



Slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan antar periode waktu.

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^k \beta_k X_{kit} + U_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$ ;  $t = 1, 2, \dots, T$ ;  $k = 1, 2, \dots, K$

### 3.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Pendekatan dengan FEM dan model dummy untuk data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model dan juga dapat menghalangi untuk mengetahui persamaan model aslinya. Oleh karena itu, estimasi perlu dilakukan dengan komponen error atau model acak. Random Effect Model (REM) mengasumsikan setiap variabel mempunyai perbedaan intersepsi. Keuntungan menggunakan model REM yaitu dapat menghilangkan heterokedastisitas, dengan menggunakan model efek tetap tidak dapat melihat pengaruh dari berbagai karakteristik yang bersifat konstan diantara individual maka digunakan model REM (Rahmadeni, 2016). Persamaan model REM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + \mu_i$$

Model ekonometrika dalam estimasi regresi data panel ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_{1it} + \beta_2 \text{Log} X_{2it} + \beta_3 \text{Log} X_{3it} + \beta_4 X_{4it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependent ( pdrb di provinsi Jawa tengah)

i = kabupaten provinsi jawa tengah (35 kabupaten kota )

t = waktu (tahun 2010 – 2016)

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien

$X_1, X_2, X_3$  = variabel independen

### 3.4 Model Estimasi Data Panel

Untuk memilih model estimasi yang dianggap paling tepat diantara ketiga model tersebut, maka dilakukan beberapa uji yakni :

#### 3.4.1 Uji Chow

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

Hipotesis yang dibentuk adalah :

$H_0$  : *Common Effects*

$H_1$  : *Fixed Effects*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ( $>$ ) dari F tabel maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ( $<$ ) dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

### 3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

$H_0$ : *Random Effects*

$H_1$ : *Fixed Effects*

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka  $H_0$  ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

### 3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini meliputi pengujian hipotesis statistik seperti uji hipotesis secara serentak (F-Test), uji hipotesis individual (t-test) dan pengujian ketetapan perkiraan ( $R^2$ ).

#### a. Pengujian Partial (uji t-statistik)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas  $t$  hitung, ketika  $\text{prob} < \text{taraf sig } 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat.

b. Pengujian secara serempak ( uji f-test statistik)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob F < taraf sig 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Astuti, 2015).

c. Pengujian Ketetapan Perkiraan ( $R^2$ )

$R^2$  adalah besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodnes of fit*) yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi.  $R^2$  mengukur proporsi (bagian) persentase total variabel data (variabel independen) yang dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai  $R^2$  semakin menjelaskan keterkaitan variabel dependen dan variabel independen.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan data gabungan antara *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* diambil dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Data *time series* jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah pada kurun waktu 2010-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Variabel Terikat**

Data yang digunakan dalam variabel ini adalah produk domestik regional bruto (Y) tahun 2010-2016 yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kab. Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kab. Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

## 2. Variabel Bebas

### a. Jumlah Penduduk ( $X_1$ )

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010-2016.

### b. IPM ( $X_2$ )

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010-2016.

### c. PAD ( $X_3$ )

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010-2016.

### d. Belanja Pemerintah ( $X_4$ )

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010-2016.

## 4.2 Hasil dan Analisis Data

Metode regresi dengan menggunakan data panel memiliki tiga model yang dapat digunakan yaitu *Common Effects*, *Fixed Effects* dan *Random Effects* Model. Untuk memilih model regresi yang lebih tepat dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman Test. Hasil dari Uji Chow Test dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan

antara model Common Effects dan model Fixed Effects, sedangkan untuk uji Hausman Test dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model Random Effects dengan model Fixed Effects.

### **Analisis Deskriptif**

***Tabel 4 1 Analisis Deskriptif***

	PDRB	JP	IPM	PAD	BP
Mean	20,879,414	949,993	69	162,215	1,389,271
Maximum	115,000,000	1,788,880	81	1,491,646	4,187,918
Minimum	4,010,718	118,424	59	38,186	403,924
Std. Dev.	19,776,396	403,584	5	149,734	583,234
Observation	245	245	245	245	245
Cross Sections	35	35	35	35	35

Sumber : Hasil pengolahan evIEWS 8

- Nilai minimum PDRB adalah sebesar 4,010,718 sedangkan nilai maximum PDRB sebesar 115,000,000. Nilai rata – rata IPM di Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,879,414 dengan standar deviasi sebesar 19,776,396. Nilai rata – rata PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 dapat diartikan bahwa pengukuran perbandingan dari jumlah penduduk, ipm, pad dan belanja pemerintah sebesar 20,879,414. Nilai standar deviasi menunjukkan data penyebaran PDRB adalah sebesar 19,776,396.
- Nilai minimum JP adalah sebesar 118,424 sedangkan nilai maximum JP sebesar 1,788,880. Nilai rata – rata JP di Provinsi Jawa Tengah sebesar 949,993 dengan standar deviasi sebesar 403,584. Nilai rata – rata JP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 dapat diartikan bahwa pengukuran perbandingan dari jumlah penduduk, ipm, pad dan belanja

pemerintah 949,993. Nilai standar deviasi menunjukkan data penyebaran JP adalah sebesar 403,584.

- Nilai minimum IPM adalah sebesar 59 sedangkan nilai maximum IPM sebesar 81. Nilai rata – rata IPM di Provinsi Jawa Tengah sebesar 69 dengan standar deviasi sebesar 5. Nilai rata – rata IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 dapat diartikan bahwa pengukuran perbandingan dari jumlah penduduk, ipm, pad dan belanja pemerintah 69. Nilai standar deviasi menunjukkan data penyebaran IPM adalah sebesar 5.
- Nilai minimum PAD adalah sebesar 38,186 sedangkan nilai maximum PAD sebesar 1,491,646. Nilai rata – rata PAD di Provinsi Jawa Tengah sebesar 162,215 dengan standar deviasi sebesar 149,734. Nilai rata – rata AHH di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 dapat diartikan bahwa pengukuran perbandingan dari jumlah penduduk, ipm, pad dan belanja pemerintah sebesar 162,215 Nilai standar deviasi menunjukkan data penyebaran PAD adalah sebesar 149,734.
- Nilai minimum BP adalah sebesar 403,924 sedangkan nilai maximum BP sebesar 4,187,918. Nilai rata – rata BP di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,389,271 dengan standar deviasi sebesar 583,234. Nilai rata – rata BP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2016 dapat diartikan bahwa pengukuran perbandingan dari jumlah penduduk, ipm, pad dan belanja pemerintah sebesar 1,389,271 Nilai standar deviasi menunjukkan data penyebaran BP adalah sebesar 583,234.



## 1. Uji Common Effect Model

*Tabel 4 2 Hasil Estimasi Common Effect Model*

Variabel	Coefficient	Prob.
PAD	69.35171	0.0000
BP	-10.37771	0.0001
IPM	1378217.	0.0000
JP	33.10121	0.0000
C	-1.02 <sup>10</sup> +08	0.0000
R-Squared	0.630750	

Sumber: data diolah eviews 8

Dari hasil regresi menggunakan teknik *Common Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-squared*) adalah sebesar 0.624595, yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 62% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 38% dijelaskan variabel lain.

## 2. Uji Fixed Effect Model

*Tabel 4 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Prob.
PAD	15.36597	0.0000
BP	0.644238	0.3089
IPM	-288760.2	0.0497
JP	74.02468	0.0000
C	-32997330	0.0053
R-squared	0.997115	

Sumber: data diolah eviews 8

Dari hasil regresi menggunakan teknik *fixed Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-squared*) adalah sebesar 0.997115, yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 99% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan variabel lain.

### 3. Uji Random Effect Model

*Tabel 4 4 Hasil Estimasi Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Prob.
PAD	19.98341	0.0000
BP	0.263627	0.6669
IPM	37473.53	0.7851
JP	34.11445	0.0000
C	-17710818	0.0888
R-Squared	0.822215	

Sumber: data diolah eviews 8

Dari hasil regresi menggunakan teknik *Random Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-squared*) adalah sebesar 0.822215, yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 82% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 18% dijelaskan variabel lain.

### 4. Uji Chow Test

Metode uji ini dilakukan untuk membandingkan pemilihan model yang lebih baik antara *common effect model* atau *fixed effect model* dengan cara melihat hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Common Effect, jika nilai Probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

$H_1$  : Fixed Effect, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikansi pada  $\alpha = 5\%$ .

Dari hasil regresi yang dilakukan untuk membandingkan model terbaik *common effect model* dengan *fixed effect model* diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut:

*Tabel 4 5 Hasil Chow dengan Redudent Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	769.517824	(34,206)	0.0000
Cross-section Chi-square	1188.762336	34	0.0000

Sumber : data diolah eviews 8

Berdasarkan hasil uji Chow dengan redundant test diperoleh nilai probabilitas cross section F sebesar 0.0000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis adalah model fixed effect.

Dari hasil pengujian diatas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan model *fixed effect* ataupun *random effect*. Dalam menentukan model yang lebih baik digunakan antara *random effect* dan *fixed effect* maka perlu dilakukan uji Hausman test.

#### 5. Uji Hausman Test

Metode dengan uji Hausman ini dilakukan untuk memilih model yang baik antara *fixed effect model* dan *random effect model* dengan cara melihat hasil probabilitasnya dengan nilai alfa. Perumusan hipotesis nya adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

$H_1$  : *Fixed Effect*, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada  $\alpha = 5\%$ .

Dari hasil regresi yang dilakukan untuk membandingkan model yang tepat antara *fixed effect* dan *random effect* diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut :

**Tabel 4 6 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.502463	4	0.0000

Sumber : data diolah eviews 8

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai distribusi chi-square sebesar 52.502463 dengan probabilitas chi-square 0.0000 dimana lebih kecil dari alpha 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ) maka model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Models.

### 4.3 Estimasi Model Regresi Panel Fixed Effect

**Tabel 4 7 Estimasi Model Regresi Panel Fixed Effect**

Variabel	Coefficient	Prob.
PAD	15.36597	0.0000
BP	0.644238	0.3089
IPM	-288760.2	0.0497
JP	74.02468	0.0000
C	-32997330	0.0053
R-Squared	0.997115	

Sumber : data diolah eviews 8

Estimasi model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh dari belanja modal, produk domestik regional bruto, pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, maka diperoleh hasil estimasi model terbaik sebagai berikut:

Model regresi fixed effect pada indeks pembangunan manusia :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 BP_{it}$$

$$Y_{it} = -32997330 + 74.02468JP + (-288760.2IPM) + 15.36597PAD + 0.644238BP$$

Keterangan :

Y = Poduk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)

i = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Waktu (2010 hingga 2016)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_4$  = Koefisien

JP = Jumlah Penduduk (Jiwa)

IPM = Indeks pembangunan Manusia (persen)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)

BP = Belanja Pemerintah (juta rupiah)

Berdasarkan hasil estimasi model *fixed effect* diatas dapat dilihat poduk domestik regional bruto sebesar -32997330 dengan asumsi variabel independen (jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah) lainnya tidak ada.

#### 4.3.2.1 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui parameter signifikan atau tidak dalam analisis data panel dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikannya nilai  $\alpha$ . Ketika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai

$\alpha=0.01,0.05,0.1$  maka variabel tersebut dinyatakan signifikan dan berpengaruh terhadap variabel dependennya.

#### **4.3.2.2 Uji -t ( Pengujian Variabel Secara Individu)**

Uji-t dilakukan untuk mengetahui signifikansi atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

#### **4.3.2.1 Pengujian Terhadap Jumlah Penduduk**

Berdasarkan hasil diatas, jumlah penduduk memiliki nilai koefisien sebesar 74.02468 dengan nilai t-hitung 8.069821 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha$  5%. ( $0.0000 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel jumlah penduduk ( $X_1$ ) signifikan dan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

#### **4.3.2.3 Pengujian Terhadap IPM**

Berdasarkan hasil diatas, IPM memiliki nilai koefisien sebesar -288760.2 dengan nilai t-hitung -1.974504 dan nilai probabilitas sebesar 0.0497. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha$  5%. ( $0.0497 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel IPM ( $X_2$ ) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto.

#### **4.3.2.4 Pengujian Terhadap PAD**

Berdasarkan hasil diatas, PAD memiliki nilai koefisien sebesar 15.36597 dengan nilai t-hitung 8.528945 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai

probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha$  5%. ( $0.0000 < 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel PAD ( $X_3$ ) signifikan dan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

#### **4.3.2.5 Pengujian Terhadap Belanja Pemerintah**

Berdasarkan hasil diatas, belanja pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 0.644238 dengan nilai t-hitung 1.019984 dan nilai probabilitas sebesar 0.3089. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari  $\alpha$  5%. ( $0.3089 > 0.05$ ) sehingga secara statistik variabel belanja pemerintah ( $X_4$ ) tidak signifikan.

#### **4.4 Uji F ( Pengujian Variabel Secara Menyeluruh )**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F-hitung berdasarkan hasil regresi diatas sebesar 1873.891 dengan probabilitas sebesar 0.000000 kurang dari  $\alpha$  5% sehingga secara statistic model estimasi *fixed effect* variabel independen jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y).

#### **4.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* nilai  $R^2$  mneunjukkan besarnya variabel independent mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka besar pengaruh variable independen terhadap variable dependent begitu juga sebaliknya,

semakin kecil nilai  $R^2$  maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap dependent

Hasil estimasi *fixed effect* menunjukkan nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0.997115. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen jumlah penduduk ( $X_1$ ), IPM ( $X_2$ ), PAD ( $X_3$ ) dan belanja pemerintah ( $X_4$ ) mampu menjelaskan variable produk domestik regional bruto (Y) sebesar 99.71%, sedangkan sisanya sebesar 0,29% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.6 Interpretasi Hasil**

Dari hasil regresi yang telah diperoleh maka dapat di interpretasikan terhadap hipotesis yang telah diambil sebelumnya. Berikut adalah interpretasi hasilnya :

1. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto dan memiliki hubungan positif 74.02468 terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah. Ini artinya setiap jumlah penduduk naik 1 jiwa maka produk domestik regional bruto mengalami kenaikan sebesar 74.02468 juta rupiah.
2. IPM berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif sebesar - 288760.2 terhadap produk domestik regional bruto. Ini artinya setiap IPM naik 1 persen maka produk domestik regional bruto mengalami penurunan sebesar - 288760.2 juta rupiah.
3. PAD berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif sebesar 15.36597 terhadap produk domestik regional bruto. Ini artinya setiap PAD naik 1



juta rupiah maka produk domestik regional bruto mengalami kenaikan sebesar 15.36597 juta rupiah.

4. Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

#### **4.7 Analisis/pembahasan**

##### **4.7.1 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk signifikan dan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Arianto (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap PDRB. Ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan maka produk domestik regional bruto juga akan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan dengan sumber daya manusia adalah pemula produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terdapat penambahan output dan penambahan hasil dan karena Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis jumlah permintaan terhadap barang dan jasa akan bertambah sehingga akan meningkatkan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.7.2 Analisis Pengaruh IPM Terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM signifikan dan berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Izzah (2015) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap PDRB. Ketika IPM mengalami kenaikan maka produk domestik regional bruto mengalami penurunan, hal ini disebabkan dengan peningkatan IPM yang tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang baik sehingga peningkatan IPM berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto. peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan-pelatihan banyak, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Tetapi jika sebaliknya akan mengakibatkan menurunnya tingkat produk domestik regional bruto,(Matahariku1, 2009).

#### **4.7.3 Analisis Pengaruh PAD Terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD signifikan dan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Afiyah (2011) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap PDRB. Ketika PAD mengalami kenaikan maka produk domestik regional bruto juga akan mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan PAD

merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan produk domestik regional bruto. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan produk domestik regional bruto daerah itu sendiri, (Harianto, 2007)

Peningkatan PAD akan mendorong produk domestik regional bruto daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu produk domestik regional bruto daerah menjadi lebih baik daripada produk domestik regional bruto daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan produk domestik regional bruto, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber – sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

#### **4.7.4 Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah**

Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto artinya tidak ada hubungan antara belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan tidak sesuainya realisasi belanja pemerintah dengan tahun sebelumnya ataupun turun, pemerintah

mengandalkan konsumsi pemerintah untuk mendongkrak perekonomian. Sebab, kegiatan ekspor-impor lesu di tengah perlambatan ekonomi global dan terganggunya konsumsi rumah tangga akibat melemahnya daya beli. Dengan kata lain konsumsi rumah tangga menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 4.8 Perbedaan Model Variabel

*Tabel 4 8 Perbedaan Model Antar Kabupaten/kota*

CROSSID	Effect	C	Konstanta
Cilacap	6,050,061	-32,997,330	39,047,391
Banyumas	-43,626,815	-32,997,330	-10,629,485
Purbalingga	-3,221,676	-32,997,330	29,775,654
Banjarnegara	-5,970,594	-32,997,330	27,026,736
Kebumen	-23,813,465	-32,997,330	9,183,865
Purworejo	8,024,786	-32,997,330	41,022,116
Wonosobo	2,819,556	-32,997,330	35,816,886
Magelang	-24,544,116	-32,997,330	8,453,214
Boyolali	-4,196,832	-32,997,330	28,800,498
Klaten	-13,582,655	-32,997,330	19,414,675
Sukoharjo	7,329,838	-32,997,330	40,327,168
Wonogiri	-4,964,360	-32,997,330	28,032,970
Karanganyar	8,087,916	-32,997,330	41,085,246
Sragen	4,624,048	-32,997,330	37,621,378
Grobogan	-35,223,518	-32,997,330	-2,226,188
Blora	-931,122	-32,997,330	32,066,208
Rembang	14,292,024	-32,997,330	47,289,354
Pati	-19,198,527	-32,997,330	13,798,803
Kudus	50,190,457	-32,997,330	83,187,787
Jepara	-20,044,994	-32,997,330	12,952,336
Demak	-17,720,185	-32,997,330	15,277,145
Semarang	3,574,326	-32,997,330	36,571,656
Temanggung	6,641,775	-32,997,330	39,639,105
kendal	3,530,202	-32,997,330	36,527,532
Batang	6,354,004	-32,997,330	39,351,334
Pekalongan	-2,730,135	-32,997,330	30,267,195
Pemalang	-33,507,668	-32,997,330	-510,338
Tegal	-38,810,151	-32,997,330	-5,812,821
Brebes	-59,435,194	-32,997,330	-26,437,864
Kota Magelang	48,727,631	-32,997,330	81,724,961
Kota Surakarta	39,094,743	-32,997,330	72,092,073
Kota Salatiga	47,964,554	-32,997,330	80,961,884
Kota Semarang	17,887,241	-32,997,330	50,884,571
Kota Pekalongan	35,557,219	-32,997,330	68,554,549
Kota Tegal	40,771,624	-32,997,330	73,768,954

Dari perhitungan hasil di atas, didapatkan bahwa Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah tertinggi adalah Kabupaten Kudus. Hal tersebut ditentukan oleh konstanta sesuai dengan table diatas yaitu sebesar 83187787 juta rupiah, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes sebesar -26437864, hal ini terjadi karena Pembangunan di Kabupaten Kudus terus meningkat sejak 2008 silam. Mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pembangunan di semua sektor ini, membuat tingkat pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pada 2008 produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 27,35 triliun. Sementara pada 2016, nilai PDRB Kudus telah mencapai Rp 90,15 triliun atau meningkat 230,46 persen.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah. Ini berarti setiap kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah.

2. Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah. Ini berarti setiap indeks pembangunan manusia akan mengurangi Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah.

3. Pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah. Ini berarti setiap kenaikan pendapatan asli daerah akan meningkatkan Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah.

4. Belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh signifikan Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah. Sehingga belanja pemerintah tidak menyebabkan kenaikan Produk domestik regional bruto di Jawa Tengah.

## **5.2 Implikasi**

1. Untuk meningkatkan Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah, Semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat menarik masyarakat tertarik untuk tinggal di Provinsi Jawa Tengah sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mengakibatkan peningkatan Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk meningkatkan Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah harus lebih membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan UMR sehingga masyarakat yang akan memilih untuk menetap di Provinsi Jawa Tengah daripada mencari pendapatan di luar daerah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkatkan produk domestik regional bruto.

3. Untuk meningkatkan Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah dapat mengembangkan kerja sama dalam menggali PAD, membentuk perseroan daerah, menerbitkan obligasi dan pinjaman daerah, dan melakukan kebijakan umum daerah sehingga kebijakan umum penganggaran yang dicanangkan pemerintah daerah untuk lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran daerah, dengan demikian akan meningkatkan PAD dan mengakibatkan peningkatan Produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah.



## Daftar Pustaka

- Adipuryanti, N. L. Y., & Sudibia, I. K. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, *XI*(1), 20–28.
- Afiyah, S. N. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, *5*(2), 52–59.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, *1*(1), 117–127.
- Arianto Christiawan Eka. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember. Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62936>
- Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia, *2*, No. 2,(2502–6704), 52–63.
- Astuti, R. D. (2015). Analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di daerah istimewa yogyakarta periode 2005-2013.
- Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, *8*(1), 1–13.
- Fitri, D. N. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1984-2013. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Neger Yogyakarta*, 1–131.
- Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hutabarat, O., & Pardamean. (2013). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tesis.
- Izzah, N. (2015). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013, *Volume 1*(No 2), 156–172.
- Julfiansyah, D. (2013). Pengaruh Investasi Pma / Pmdn Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, *11*(2).
- Lontaan, I. C., Pangerapan, S., Sam, U., & Manado, R. (2014). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014 Analysis of

- Regional Expenditure in Minahasa Local Government Fiscal, 4(1), 898–906.
- Matahariku1. (2009). Pembangunan Manusia & Pertumbuhan Ekonomi (Memungut Celah Dialektik). Retrieved July 17, 2018, from <https://matahariku1.wordpress.com/2009/08/12/pembangunan-manusia-pertumbuhan-ekonomi-memungut-celah-dialektik/>
- Mulyanto. (2007). Aspek Dan Dimensi Keuangan Daerah Diera Otonomi Dan Desentralisasi. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 2(No. 1), 43–52.
- Murni Asfia. (2006). *Ekonomi Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Mutia Sari;Mohd. Nur Syechalad, S. A. M. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Paksi, A. K. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*, 1–84.
- Rahardja, Prathama, M. M. (2008). *Teori Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Rahmadeni, & Yonedts, E. (2016). Analisis Regresi Data Panel Pada Pemodelan Produksi Panen Kelapa Sawit Di Kebun Sawit Plasma Kampung Buatan Baru, 2(2460–4542).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jejak*, 8(1), 88–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Ratnasari, ni putu anik mas, Kencana, I. putu eka nila, & Gandhiadi, G. K. (2014). Aplikasi regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (studi kasus : PT. PLN Gianyar). *Jurnal Matematika*, 3(1), 1–7. Retrieved from [ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/9599/7109](https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/9599/7109)
- Setiyawati, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Kemiskinan dan Pengangguran Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, Vol. 9(No. 1, April).

- Statistik, B. pusat. (2018). Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. jakarta: Kencana. <https://doi.org/3309>
- Sukirno, S. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Todaro, M. P. (2000). *Ekonomi Pembangunan* (erlangga). jakarta.
- UNDP. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- Zaris, R. (1987). *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. jakarta: LPFE UI..

# LAMPIRAN

TAHUN	KOTA/KAB	PDRB	Jumlah Penduduk	IPM	PAD	Belanja Pemerintah
2010	Cilacap	75,099,089.89	1,644,990	64.18	126,058	1,237,941.68
2011	Cilacap	78,156,818.82	1,655,668	64.73	160,777	1,550,277.52
2012	Cilacap	79,702,237.61	1,666,192	65.72	150,456	1,792,586.83
2013	Cilacap	81,022,670.26	1,676,098	66.8	191,853	2,047,162.55
2014	Cilacap	83,391,500.18	1,685,631	67.25	230,155	2,205,741.81
2015	Cilacap	88,357,606.68	1,694,726	67.77	280,688	2,657,124.48
2016	Cilacap	92,830,362.20	1,703,390	68.6	428,598	2,962,482.92
2010	Banyumas	23,016,943.39	1,557,480	66.87	65,364	1,120,296.57
2011	Banyumas	24,538,595.63	1,574,002	67.45	172,488	1,476,265.62
2012	Banyumas	25,982,158.22	1,589,930	68.06	188,590	1,732,236.27
2013	Banyumas	27,793,138.47	1,605,585	68.55	229,194	2,018,052.96
2014	Banyumas	29,367,687.40	1,620,772	69.25	317,728	2,285,326.47
2015	Banyumas	31,164,876.40	1,635,909	69.89	385,678	2,531,669.33
2016	Banyumas	33,051,046.65	1,650,625	70.49	541,418	3,166,133.43
2010	Purbalingga	10,858,631.52	850,729	63.61	68,143	708,422.83
2011	Purbalingga	11,474,221.22	860,725	64.33	91,722	902,543.79
2012	Purbalingga	12,138,445.34	870,423	64.94	91,191	1,084,087.07
2013	Purbalingga	12,778,311.23	879,880	65.53	101,376	1,126,557.03
2014	Purbalingga	13,397,712.78	889,172	66.23	162,116	1,271,839.63

2015	Purbalingga	14,130,612.26	898,376	67.03	180,203	1,466,143.22
2016	Purbalingga	14,806,549.63	907,507	67.48	251,817	1,823,605.19
2010	Banjarnegara	9,439,359.00	870,528	60.7	60,036	751,600.90
2011	Banjarnegara	9,952,403.66	877,201	61.58	60,279	1,037,963.36
2012	Banjarnegara	10,473,363.43	883,710	62.29	63,549	1,111,145.36
2013	Banjarnegara	11,043,083.01	889,894	62.84	76,518	1,175,474.03
2014	Banjarnegara	11,629,845.85	896,038	63.15	103,502	1,349,768.03
2015	Banjarnegara	12,266,046.35	901,826	64.73	135,711	1,612,219.38
2016	Banjarnegara	12,929,657.38	907,410	65.52	221,048	1,967,224.60
2010	Kebumen	12,311,421.83	1,161,920	63.08	67,981	999,053.71
2011	Kebumen	13,068,985.50	1,166,989	64.05	68,321	1,216,956.11
2012	Kebumen	13,707,057.24	1,171,998	64.47	79,176	1,412,496.99
2013	Kebumen	14,333,333.50	1,176,622	64.86	104,722	1,548,176.71
2014	Kebumen	15,163,091.84	1,180,894	65.67	126,808	1,906,501.96
2015	Kebumen	16,115,554.01	1,184,882	66.87	173,508	2,285,365.00
2016	Kebumen	16,916,219.56	1,188,603	67.41	291,016	2,604,207.34
2010	Purworejo	8,513,490.56	696,607	68.16	60,989	775,422.02
2011	Purworejo	8,993,814.30	699,682	69.11	67,354	968,310.61
2012	Purworejo	9,406,242.93	702,678	69.4	77,074	1,126,130.84
2013	Purworejo	9,870,969.95	705,527	69.77	109,488	1,204,862.65
2014	Purworejo	10,312,937.79	708,006	70.12	135,087	1,445,588.97

2015	Purworejo	10,862,645.98	710,386	70.37	180,292	1,783,917.69
2016	Purworejo	11,418,355.22	712,686	70.66	255,599	2,034,299.30
2010	Wonosobo	9,005,925.54	756,182	62.5	60,541	679,606.52
2011	Wonosobo	9,489,550.46	760,828	63.07	60,315	888,438.42
2012	Wonosobo	9,935,905.32	765,113	64.18	55,401	986,536.91
2013	Wonosobo	10,333,757.05	769,396	64.57	72,795	988,103.77
2014	Wonosobo	10,828,168.68	773,391	65.2	107,655	1,220,323.64
2015	Wonosobo	11,334,080.04	777,122	65.7	145,151	1,494,447.29
2016	Wonosobo	11,915,998.92	780,793	66.19	199,895	1,801,693.75
2010	Magelang	14,363,230.57	1,183,996	63.28	78,651	1,017,191.66
2011	Magelang	15,323,039.48	1,196,895	64.16	88,181	1,062,376.98
2012	Magelang	16,071,142.55	1,209,486	64.75	95,290	1,146,500.04
2013	Magelang	17,020,755.61	1,221,673	65.86	124,152	1,258,155.35
2014	Magelang	17,936,288.38	1,233,701	66.35	134,564	1,655,060.22
2015	Magelang	18,864,651.97	1,245,496	67.13	200,654	1,744,730.81
2016	Magelang	19,876,744.24	1,257,123	67.85	288,486	2,340,396.94
2010	Boyolali	13,721,701.47	932,311	68.76	80,020	964,590.28
2011	Boyolali	14,592,026.26	939,020	69.14	81,391	1,101,848.60
2012	Boyolali	15,369,974.36	945,511	69.51	108,796	1,269,226.81
2013	Boyolali	16,266,498.68	951,809	69.81	142,677	1,421,830.96
2014	Boyolali	17,148,350.76	957,913	70.34	181,450	1,617,991.65

2015	Boyolali	18,170,383.95	963,690	71.74	221,874	1,832,767.46
2016	Boyolali	19,132,556.30	969,325	72.18	292,310	2,150,966.57
2010	Klaten	17,002,049.66	1,131,971	70.76	71,371	1,028,961.91
2011	Klaten	18,071,350.51	1,137,973	71.16	65,498	1,316,714.04
2012	Klaten	19,102,402.71	1,143,676	71.71	75,874	1,439,619.16
2013	Klaten	20,241,429.01	1,149,002	72.42	82,921	1,621,602.41
2014	Klaten	21,424,522.36	1,154,028	73.19	100,379	1,884,326.29
2015	Klaten	22,558,976.15	1,158,795	73.81	156,098	2,077,786.00
2016	Klaten	23,717,931.02	1,163,218	73.97	224,197	2,423,335.41
2010	Sukoharjo	16,357,221.65	825,782	71.53	60,298	781,475.48
2011	Sukoharjo	17,319,638.62	833,915	72.34	71,052	969,298.86
2012	Sukoharjo	18,342,247.26	841,773	72.81	124,643	1,196,799.26
2013	Sukoharjo	19,401,889.44	849,392	73.22	154,068	1,281,648.11
2014	Sukoharjo	20,449,009.84	856,861	73.76	179,167	1,526,637.45
2015	Sukoharjo	21,612,078.19	864,207	74.53	235,934	1,635,302.27
2016	Sukoharjo	22,845,982.81	871,397	75.06	363,163	1,912,871.49
2010	Wonogiri	13,310,571.10	930,486	63.9	64,818	975,857.77
2011	Wonogiri	13,786,711.34	934,616	64.75	62,184	1,110,643.92
2012	Wonogiri	14,605,088.22	938,704	65.75	75,187	1,325,195.59
2013	Wonogiri	15,303,280.47	942,430	66.4	87,845	1,449,245.45
2014	Wonogiri	16,107,795.17	945,682	66.77	140,193	1,652,579.86



2015	Wonogiri	16,977,198.56	949,017	67.76	174,557	1,877,830.22
2016	Wonogiri	17,865,345.42	951,975	68.23	218,605	2,249,505.01
2010	Karanganyar	16,393,788.72	814,803	70.31	73,977	794,315.55
2011	Karanganyar	17,205,063.88	823,511	71	82,578	980,180.65
2012	Karanganyar	18,219,456.66	831,891	72.26	89,499	1,173,205.69
2013	Karanganyar	19,256,516.28	840,199	73.33	121,180	1,287,163.76
2014	Karanganyar	20,262,444.42	848,326	73.89	143,022	1,609,306.82
2015	Karanganyar	21,286,287.14	856,198	74.26	181,061	1,775,944.20
2016	Karanganyar	22,428,793.80	864,021	74.9	301,308	2,052,584.51
2010	Sragen	15,832,557.66	859,780	67.67	69,398	857,900.52
2011	Sragen	16,870,231.27	863,977	68.12	82,381	1,030,854.86
2012	Sragen	17,902,104.86	868,090	68.91	89,875	1,197,434.07
2013	Sragen	19,102,181.74	871,991	69.95	105,574	1,408,595.39
2014	Sragen	20,169,824.79	875,615	70.52	137,996	1,697,047.24
2015	Sragen	21,390,871.20	879,027	71.1	195,291	2,034,911.83
2016	Sragen	22,618,321.66	882,090	71.43	297,176	2,190,956.84
2010	Grobokan	12,766,021.74	1,311,107	64.56	56,176	873,479.99
2011	Grobokan	13,172,711.96	1,319,822	65.41	67,719	1,173,213.71
2012	Grobokan	13,842,047.14	1,328,183	66.39	84,755	1,203,540.60
2013	Grobokan	14,474,728.93	1,336,317	67.43	101,117	1,507,949.20
2014	Grobokan	15,064,456.66	1,343,985	67.77	172,172	1,645,804.82

2015	Grobokan	15,962,619.43	1,351,429	68.05	208,439	1,979,187.27
2016	Grobokan	16,674,629.70	1,358,404	68.52	334,951	2,249,898.79
2010	Blora	10,149,079.63	831,228	63.02	56,500	845,448.95
2011	Blora	10,597,723.01	835,785	63.88	58,400	925,821.28
2012	Blora	11,116,865.91	840,193	64.7	61,400	1,125,135.37
2013	Blora	11,712,504.85	844,325	65.37	77,000	1,318,484.05
2014	Blora	12,227,201.29	848,387	65.84	119,769	1,468,208.05
2015	Blora	12,882,587.70	852,108	66.22	130,000	1,669,967.94
2016	Blora	15,913,432.03	855,573	66.61	171,278	1,958,884.71
2010	Rembang	8,373,546.87	592,481	64.53	78,227	629,791.41
2011	Rembang	8,808,302.78	598,087	65.36	80,131	868,066.64
2012	Rembang	9,277,163.23	603,573	66.03	89,948	969,132.24
2013	Rembang	9,780,750.39	608,891	66.84	110,867	1,060,648.44
2014	Rembang	10,284,274.36	614,065	67.4	139,991	1,275,908.65
2015	Rembang	10,850,269.20	619,173	68.18	182,191	1,211,257.90
2016	Rembang	11,418,008.73	624,096	68.6	234,168	1,937,216.57
2010	Pati	18,782,546.64	1,193,215	65.13	92,114	1,016,594.95
2011	Pati	19,893,325.24	1,201,801	65.71	107,986	1,200,081.52
2012	Pati	21,072,328.70	1,210,001	66.13	131,188	1,425,840.27
2013	Pati	22,329,693.98	1,217,930	66.47	134,962	1,653,021.49
2014	Pati	23,365,213.99	1,225,603	66.99	173,223	1,862,733.25

2015	Pati	24,770,325.07	1,232,889	68.51	243,577	2,136,260.32
2016	Pati	26,121,955.34	1,239,989	69.03	314,921	2,554,346.77
2010	Kudus	52,933,496.31	779,076	69.22	92,294	916,230.40
2011	Kudus	55,175,794.89	789,875	69.89	100,621	950,508.37
2012	Kudus	57,440,810.51	800,403	70.57	113,622	1,152,274.70
2013	Kudus	59,944,556.52	810,893	71.58	138,912	1,155,490.62
2014	Kudus	62,600,680.87	821,109	72	168,382	1,508,269.21
2015	Kudus	65,029,937.50	831,303	72.72	244,742	1,706,848.43
2016	Kudus	66,669,085.40	841,499	72.94	279,239	1,922,732.24
2010	Jepara	13,347,321.26	1,099,710	66.76	71,081	817,087.41
2011	Jepara	14,004,325.03	1,117,784	67.63	97,874	1,130,210.40
2012	Jepara	14,824,995.87	1,135,628	68.45	103,717	1,297,076.71
2013	Jepara	15,623,738.87	1,153,321	69.11	110,489	1,351,530.90
2014	Jepara	16,374,715.21	1,170,785	69.61	137,545	1,505,224.19
2015	Jepara	17,210,365.92	1,188,289	70.02	193,119	1,856,335.59
2016	Jepara	18,074,134.88	1,205,800	70.25	322,510	2,113,666.48
2010	Demak	11,647,735.65	1,057,695	66.02	54,560	805,850.43
2011	Demak	12,275,702.69	1,070,307	66.84	67,751	1,086,725.00
2012	Demak	12,823,227.04	1,082,498	67.55	78,032	1,208,566.95
2013	Demak	13,499,226.47	1,094,495	68.38	100,415	1,338,417.93
2014	Demak	14,078,419.80	1,106,209	68.95	158,654	1,560,956.57

2015	Demak	14,912,999.60	1,117,905	69.75	206,243	1,791,583.34
2016	Demak	15,666,347.56	1,129,298	70.1	287,458	1,953,653.24
2010	Semarang	21,572,136.87	932,702	69.58	97,182	777,834.59
2011	Semarang	22,925,456.80	946,774	70.35	134,485	1,042,026.78
2012	Semarang	24,306,718.35	960,497	70.88	129,935	1,215,522.16
2013	Semarang	25,758,121.08	974,115	71.29	166,506	1,333,537.78
2014	Semarang	27,264,112.96	987,597	71.65	211,840	1,505,315.32
2015	Semarang	28,768,327.30	1,000,887	71.89	238,220	1,669,408.31
2016	Semarang	30,283,032.61	1,014,198	72.4	318,536	1,953,940.40
2010	Temanggung	9,710,199.27	709,913	63.08	55,095	646,510.20
2011	Temanggung	10,301,569.79	717,402	64.14	58,339	816,160.55
2012	Temanggung	10,740,983.02	724,688	64.91	66,429	956,324.16
2013	Temanggung	11,299,342.97	731,927	65.52	84,226	1,000,841.23
2014	Temanggung	11,867,679.59	738,881	65.97	98,996	1,170,880.30
2015	Temanggung	12,489,394.54	745,825	67.07	152,161	1,505,003.75
2016	Temanggung	13,110,745.64	752,486	67.6	281,328	1,688,885.74
2010	Kendal	18,798,278.37	901,985	66.23	75,774	828,122.15
2011	Kendal	20,032,434.32	910,494	66.96	85,677	1,109,885.63
2012	Kendal	21,075,717.33	918,798	67.55	87,151	1,163,988.89
2013	Kendal	22,386,123.50	926,791	67.98	107,395	1,270,620.87
2014	Kendal	23,536,834.39	934,627	68.46	155,567	1,414,346.67

2015	Kendal	24,762,325.36	942,283	69.57	171,289	1,692,494.77
2016	Kendal	26,131,137.07	949,682	70.11	265,074	1,989,413.40
2010	Batang	9,447,328.38	708,088	61.64	44,570	601,702.81
2011	Batang	10,025,044.65	715,506	62.59	53,431	796,248.26
2012	Batang	10,488,456.63	722,596	63.09	56,175	900,205.03
2013	Batang	11,104,696.78	729,591	63.6	83,242	1,067,412.68
2014	Batang	11,693,897.06	736,497	64.07	108,938	1,212,281.05
2015	Batang	12,328,239.23	743,090	65.46	143,093	1,368,164.75
2016	Batang	12,942,691.09	749,720	66.38	209,958	1,676,569.62
2010	Pekalonagn	10,254,315.35	840,212	63.75	55,968	707,030.24
2011	Pekalonagn	10,834,201.09	847,390	64.72	76,011	926,008.75
2012	Pekalonagn	11,354,849.90	854,396	65.33	86,765	1,047,328.47
2013	Pekalonagn	12,034,805.89	861,125	66.26	127,126	1,267,308.41
2014	Pekalonagn	12,630,368.82	867,701	66.98	153,761	1,395,905.89
2015	Pekalonagn	13,234,564.04	873,986	67.4	238,975	1,606,482.57
2016	Pekalonagn	13,917,701.83	880,092	67.71	310,573	1,882,800.85
2010	Pemalang	11,282,196.10	1,263,584	58.64	61,499	878,511.33
2011	Pemalang	11,847,199.06	1,269,219	59.66	71,726	1,178,756.05
2012	Pemalang	12,477,235.25	1,274,606	60.78	77,349	1,196,453.00
2013	Pemalang	13,172,063.61	1,279,581	61.81	92,422	1,477,106.03
2014	Pemalang	13,898,669.42	1,284,171	62.35	117,134	1,615,850.55

2015	Pemalang	14,673,696.23	1,288,577	63.7	190,242	1,958,568.74
2016	Pemalang	15,463,800.55	1,292,609	64.17	275,458	1,832,248.07
2010	Tegal	15,106,509.91	1,397,193	61.14	74,304	927,855.99
2011	Tegal	16,071,820.41	1,403,427	61.97	83,975	1,116,860.74
2012	Tegal	16,912,249.74	1,409,424	62.67	84,974	1,347,362.42
2013	Tegal	18,050,291.97	1,414,983	63.5	124,014	1,531,862.42
2014	Tegal	18,958,841.04	1,420,106	64.1	180,430	1,714,883.15
2015	Tegal	19,999,475.45	1,424,891	65.04	255,733	1,934,297.12
2016	Tegal	21,182,917.23	1,429,386	65.84	316,051	2,628,432.85
2010	Brebes	20,158,107.77	1,736,782	59.49	70,467	1,221,166.65
2011	Brebes	21,498,422.48	1,746,613	60.51	86,210	1,304,000.16
2012	Brebes	22,482,262.67	1,756,018	60.92	89,517	1,440,489.26
2013	Brebes	23,812,056.92	1,764,982	61.87	107,109	1,661,296.20
2014	Brebes	25,074,171.51	1,773,373	62.55	153,414	1,967,168.96
2015	Brebes	26,572,834.89	1,781,379	63.18	262,782	2,392,376.92
2016	Brebes	27,921,986.33	1,788,880	63.98	339,156	2,962,040.02
2010	Kota Magelang	4,010,718.18	118,424	73.99	50,086	416,606.59
2011	Kota Magelang	4,255,662.21	119,003	74.47	55,023	469,411.61
2012	Kota Magelang	4,484,268.08	119,416	75	63,085	536,348.69
2013	Kota Magelang	4,755,092.20	119,879	75.29	79,890	630,850.72
2014	Kota Magelang	4,992,112.82	120,438	75.79	98,314	682,223.87

2015	Kota Magelang	5,247,341.27	120,792	76.39	131,400	736,340.44
2016	Kota Magelang	5,518,684.53	121,112	77.16	220,316	881,415.64
2010	Kota Surakarta	21,469,551.30	500,211	77.45	120,183	838,253.11
2011	Kota Surakarta	22,848,439.42	502,873	78	159,165	982,645.95
2012	Kota Surakarta	24,123,781.59	505,401	78.44	189,737	1,145,170.90
2013	Kota Surakarta	25,631,681.32	507,798	78.89	262,906	1,375,304.86
2014	Kota Surakarta	26,984,358.61	510,105	79.34	297,027	1,479,827.90
2015	Kota Surakarta	28,453,493.87	512,226	80.14	341,534	1,532,527.10
2016	Kota Surakarta	29,966,373.01	514,171	80.76	425,503	1,795,120.22
2010	Kota Salatiga	5,845,475.81	170,692	78.35	51,590	403,923.54
2011	Kota Salatiga	6,230,219.49	173,377	78.76	62,499	458,618.40
2012	Kota Salatiga	6,574,907.26	175,989	79.1	63,281	551,634.85
2013	Kota Salatiga	6,989,045.50	178,719	79.37	67,830	529,237.63
2014	Kota Salatiga	7,378,042.82	181,304	79.98	92,132	645,787.98
2015	Kota Salatiga	7,759,181.62	183,815	80.96	105,918	673,865.04
2016	Kota Salatiga	8,163,940.76	186,420	81.14	203,769	934,038.58
2010	Kota Semarang	80,824,099.97	1,560,013	76.96	293,827	1,679,071.59
2011	Kota Semarang	86,142,966.70	1,588,511	77.58	427,312	2,036,582.64
2012	Kota Semarang	91,282,029.07	1,616,494	78.04	660,372	2,053,334.80
2013	Kota Semarang	96,985,402.04	1,644,374	78.68	714,027	2,473,490.61
2014	Kota Semarang	103,109,874.91	1,672,994	79.24	819,742	2,957,182.89

2015	Kota Semarang	109,110,689.61	1,701,114	80.23	1,052,732	3,200,860.10
2016	Kota Semarang	115,485,429.48	1,729,083	81.19	1,491,646	4,187,918.41
2010	Kota Pekalongan	4,624,260.08	282,018	68.95	38,186	414,803.19
2011	Kota Pekalongan	4,878,332.22	285,000	69.54	53,122	505,918.79
2012	Kota Pekalongan	5,151,813.52	288,001	69.95	59,819	561,670.05
2013	Kota Pekalongan	5,456,196.88	290,903	70.82	79,069	664,175.35
2014	Kota Pekalongan	5,755,282.26	293,718	71.53	104,203	736,794.86
2015	Kota Pekalongan	6,043,095.73	296,404	72.69	150,192	792,543.90
2016	Kota Pekalongan	6,367,272.96	299,222	73.32	178,604	922,612.24
2010	Kota Tegal	6,895,713.33	240,005	69.33	79,133	454,854.97
2011	Kota Tegal	7,341,540.16	241,326	70.03	94,465	572,009.66
2012	Kota Tegal	7,650,479.56	242,714	70.68	117,210	586,687.29
2013	Kota Tegal	8,084,175.73	243,901	71.44	148,202	673,040.14
2014	Kota Tegal	8,491,325.37	244,978	72.2	166,143	783,099.15
2015	Kota Tegal	8,953,879.56	246,119	72.96	229,575	959,420.55
2016	Kota Tegal	9,440,530.97	247,212	73.55	287,344	1,133,323.56



Common Effect

Dependent Variable: PDRB  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/24/18 Time: 22:42  
 Sample: 2010 2016  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	69.35171	9.713416	7.139786	0.0000
BP	-10.37771	2.689139	-3.859120	0.0001
IPM	1378217.	232540.9	5.926770	0.0000
JP	33.10121	3.167952	10.44877	0.0000
C	-1.02E+08	16911888	-6.034987	0.0000
R-squared	0.630750	Mean dependent var	20879414	
Adjusted R-squared	0.624595	S.D. dependent var	19776396	
S.E. of regression	12117053	Akaike info criterion	35.47832	
Sum squared resid	3.52E+16	Schwarz criterion	35.54978	
Log likelihood	-4341.095	Hannan-Quinn criter.	35.50710	
F-statistic	102.4913	Durbin-Watson stat	0.048163	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect

Dependent Variable: PDRB  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/24/18 Time: 22:30  
 Sample: 2010 2016  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	15.36597	1.801626	8.528945	0.0000
BP	0.644238	0.631616	1.019984	0.3089
IPM	-288760.2	146244.4	-1.974504	0.0497
JP	74.02468	9.173027	8.069821	0.0000
C	-32997330	11712622	-2.817245	0.0053

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997115	Mean dependent var	20879414
Adjusted R-squared	0.996583	S.D. dependent var	19776396
S.E. of regression	1155981.	Akaike info criterion	30.90378
Sum squared resid	2.75E+14	Schwarz criterion	31.46113
Log likelihood	-3746.713	Hannan-Quinn criter.	31.12822
F-statistic	1873.891	Durbin-Watson stat	0.505322
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/24/18 Time: 22:47

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	19.98341	1.627238	12.28057	0.0000
BP	0.263627	0.611673	0.430993	0.6669
IPM	37473.53	137273.0	0.272985	0.7851
JP	34.11445	4.500704	7.579802	0.0000
C	-17710818	10363953	-1.708886	0.0888

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	11840991	0.9906
Idiosyncratic random	1155981.	0.0094

Weighted Statistics

R-squared	0.822215	Mean dependent var	769904.0
Adjusted R-squared	0.819252	S.D. dependent var	2981143.
S.E. of regression	1267418.	Sum squared resid	3.86E+14
F-statistic	277.4859	Durbin-Watson stat	0.462431
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.371978	Mean dependent var	20879414
Sum squared resid	5.99E+16	Durbin-Watson stat	0.002975

Chow Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	769.517824 1188.76233	(34,206)	0.0000
Cross-section Chi-square	6	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 07/25/18 Time: 00:39

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	69.35171	9.713416	7.139786	0.0000
BP	-10.37771	2.689139	-3.859120	0.0001
IPM	1378217.	232540.9	5.926770	0.0000
JP	33.10121	3.167952	10.44877	0.0000
C	-1.02E+08	16911888	-6.034987	0.0000
R-squared	0.630750	Mean dependent var	20879414	
Adjusted R-squared	0.624595	S.D. dependent var	19776396	
S.E. of regression	12117053	Akaike info criterion	35.47832	
Sum squared resid	3.52E+16	Schwarz criterion	35.54978	
Log likelihood	-4341.095	Hannan-Quinn criter.	35.50710	
F-statistic	102.4913	Durbin-Watson stat	0.048163	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Husman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.502463	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	15.365971	19.983414	0.597953	0.0000
BP	0.644238	0.263627	0.024794	0.0156
	-			
	288760.19681		2543537019.07698	
IPM		937473.533822	4	0.0000
JP	74.024684	34.114446	63.888088	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 07/25/18 Time: 00:41

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32997330	11712622	-2.817245	0.0053
PAD	15.36597	1.801626	8.528945	0.0000
BP	0.644238	0.631616	1.019984	0.3089
IPM	-288760.2	146244.4	-1.974504	0.0497
JP	74.02468	9.173027	8.069821	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997115	Mean dependent var	20879414
Adjusted R-squared	0.996583	S.D. dependent var	19776396
S.E. of regression	1155981.	Akaike info criterion	30.90378
Sum squared resid	2.75E+14	Schwarz criterion	31.46113
Log likelihood	-3746.713	Hannan-Quinn criter.	31.12822
F-statistic	1873.891	Durbin-Watson stat	0.505322
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

Variabel Model

CROSSID	Effect	C	Konstanta
Cilacap	6,050,061	-32,997,330	39,047,391
Banyumas	-43,626,815	-32,997,330	-10,629,485
Purbalingga	-3,221,676	-32,997,330	29,775,654
Banjarnegara	-5,970,594	-32,997,330	27,026,736
Kebumen	-23,813,465	-32,997,330	9,183,865
Purworejo	8,024,786	-32,997,330	41,022,116
Wonosobo	2,819,556	-32,997,330	35,816,886
Magelang	-24,544,116	-32,997,330	8,453,214
Boyolali	-4,196,832	-32,997,330	28,800,498
Klaten	-13,582,655	-32,997,330	19,414,675
Sukoharjo	7,329,838	-32,997,330	40,327,168
Wonogiri	-4,964,360	-32,997,330	28,032,970
Karanganyar	8,087,916	-32,997,330	41,085,246
Sragen	4,624,048	-32,997,330	37,621,378
Grobogan	-35,223,518	-32,997,330	-2,226,188
Blora	-931,122	-32,997,330	32,066,208
Rembang	14,292,024	-32,997,330	47,289,354
Pati	-19,198,527	-32,997,330	13,798,803
Kudus	50,190,457	-32,997,330	83,187,787
Jepara	-20,044,994	-32,997,330	12,952,336
Demak	-17,720,185	-32,997,330	15,277,145
Semarang	3,574,326	-32,997,330	36,571,656
Temanggung	6,641,775	-32,997,330	39,639,105
kendal	3,530,202	-32,997,330	36,527,532
Batang	6,354,004	-32,997,330	39,351,334
Pekalongan	-2,730,135	-32,997,330	30,267,195
Pemalang	-33,507,668	-32,997,330	-510,338
Tegal	-38,810,151	-32,997,330	-5,812,821
Brebes	-59,435,194	-32,997,330	-26,437,864
Kota Magelang	48,727,631	-32,997,330	81,724,961
Kota Surakarta	39,094,743	-32,997,330	72,092,073
Kota Salatiga	47,964,554	-32,997,330	80,961,884
Kota Semarang	17,887,241	-32,997,330	50,884,571
Kota Pekalongan	35,557,219	-32,997,330	68,554,549
Kota Tegal	40,771,624	-32,997,330	73,768,954